

Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso)

Charmenita Arsely Ruhu¹, Fredrik Bastian Kawani^{2*}, Feliks Arfid Guampe³

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena

^{2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Tentena

*Email: erikkawani@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submitted, 7 Mei 2024

Revised, 15 Mei 2024

Accepted, 16 Mei 2024

Kata kunci:

Dana Desa, Alokasi Dana, Desa, Pengelolaan, Persepsi, Masyarakat

Keywords:

Village Funds, Village Fund, Allocation, Management, Perception, Community

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta persepsi masyarakat terhadap pengelolaan tersebut di Desa Bo'e, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Bo'e, dengan total populasi sebanyak 1.480 orang, dan sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling, yang melibatkan 5 orang, termasuk kepala desa, bendahara desa, dan masyarakat yang mengetahui program pemerintah desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e telah dikelola sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pelaksanaannya dinilai baik oleh masyarakat. Sosialisasi mengenai pengelolaan dana tersebut dan peningkatan kerja sama antara lembaga dan masyarakat disarankan sebagai langkah perbaikan ke depan.

ABSTRACT

This study aims to assess the management of Village Funds and Village Fund Allocation, as well as the community's perception of such management in Bo'e Village, Pamona Selatan District, Poso Regency. The research employs a qualitative approach. The population consists of village officials and the community in Bo'e Village, with a total population of 1,480 individuals, and the sample was selected using purposive sampling, involving 5 people, including the village head, village treasurer, and community members aware of the village government program. Data collection was conducted through interviews and documentation, while data analysis was performed using a qualitative method with a holistic approach. The results indicate that the Village Funds and Village Fund Allocation in Bo'e Village have been managed in line with the Village Budget, and their implementation is well-regarded by the community. Increased socialization of the fund management and improved collaboration between institutions and the community are suggested as future improvement steps.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang saat ini berlaku di desa memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam mendukung pemerintah daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah, yang ditandai dengan meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan, baik terkait pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan (Guampe et al., 2023; Mustanir et al., 2023). Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dalam perencanaan guna menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah yang luas berarti memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Desa, sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi dan integritas sebagai suatu kesatuan. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar, disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai, diperlukan untuk memperkuat otonomi desa menuju kemandirian desa. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), untuk menunjang berbagai sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, dan untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa (Jatmiko, 2020; Manatar et al., 2021; Nuryadi & Istiqomah, 2023; Tumbelaka et al., 2020; Wulan & Helmy, 2023; Yosefa Dhiu et al., 2023).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa masalah seperti ketidaksesuaian pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pembangunan dengan adanya Dana Desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Dana Desa dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa, yang mulai dijalankan pada tahun 2015, memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola Dana Desa. Melalui Dana Desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam penerapan Dana Desa dan tercapainya pengelolaan Dana Desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dana Desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya Dana Desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan Dana Desa, seperti halnya pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai (Jatmiko, 2020; Nuryadi & Istiqomah, 2023; Tumbelaka et al., 2020; Wulan & Helmy, 2023; Yosefa Dhiu et al., 2023).

Dengan demikian, pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa yang adil dan merata. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting, di mana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan, yang akan dibantu oleh beberapa

lembaga lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta masyarakat desa.

Saat ini, alokasi Dana Desa sangat digencarkan oleh pemerintah dan daerah sebagai sumber awal pendapatan desa, yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa dalam memanfaatkan Dana Desa. Hal ini melalui berbagai proses sehingga pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan pemerintah daerah dan pusat (Ridha). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dua hal yakni bagaimana pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan dan bagaimana persepsi masyarakat Desa Bo'e terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Bo'e, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Lokasi ini dipilih untuk menangkap fenomena yang sebenarnya terjadi di objek penelitian, dengan tujuan memperoleh data yang akurat. Waktu penelitian berlangsung selama dua bulan, dimulai sejak izin penelitian diberikan. Bulan pertama digunakan untuk pengumpulan data, sedangkan bulan kedua digunakan untuk pengelolaan data, penyajian dalam bentuk skripsi, dan proses bimbingan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek yang diteliti, seperti hasil wawancara, survei, dan kuesioner terhadap responden. Data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya, yang dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, seperti diagram, grafik, atau tabel informasi penting. Populasi penelitian ini terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Bo'e, dengan jumlah 1.480 orang, yang terbagi menjadi 769 laki-laki dan 711 perempuan. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, melibatkan 5 orang, termasuk kepala desa, bendahara desa, dan masyarakat yang mengetahui program pemerintah desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali permasalahan yang diteliti dan memahami perilaku responden. Dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa catatan, buku, surat kabar, dan foto kegiatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk memahami fenomena secara holistik. Analisis dilakukan melalui proses pengkodean, dengan tahapan open coding, axial coding, dan selective coding, guna mengidentifikasi dan menyusun konsep-konsep penting dari data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Reponden

Tabel 1. Karakteristik Usia Responden

No	Nama Responden	Usia	Presentase
1.	KB	50 Tahun	21,01%
2.	OK	40 Tahun	16,81%
3.	JM	55 Tahun	23,10%
4	YN	58 Tahun	24,37%
5	AM	35 Tahun	14,71%

Tabel 1. Menunjukkan bahwa responden memiliki variasi usia, dengan mayoritas berada dalam rentang usia 35 hingga 58 tahun. Persentase tertinggi responden berada pada kategori usia 58 tahun (24,37%), sementara persentase terendah berada pada kategori usia 35 tahun (14,71%).

Perbedaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan. Dana Desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk pembangunan desa yang menuju pada pembangunan fisik desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) khusus untuk operasional Pemerintah Desa Bo'e. Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e tidak bisa membiayai secara fisik. Alokasi Dana Desa tersebut yang digunakan untuk gaji, tunjangan, dan ATK Pemerintah Desa Bo'e. (wawancara Kepala Desa dan Bendahara Desa Bo'e).

Tabel 2. Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Tahun Anggaran	Alokasi Dana Desa	Dana Desa
2020	562.528.400,00	1.654.308.766,00
2021	522.365.900,00	1.000.489.000,00
2022	517.391.000,00	836.757.000,00

Sumber Data: APBDes Desa Bo'e

Dilihat dari tabel 2. Dana Desa Bo'e Tahun 2020 sebesar 1.654.308.766,00, Dana Desa Bo'e Tahun 2021 sebesar 1.000.489.000,00, Dana Desa Tahun 2022 sebesar 836.757.000,00, telah digunakan sesuai dengan APBDes yang telah ditentukan. Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 sampai 2022. Pada tahun 2020 Alokasi Dana Desa diturunkan pemerintah sebesar 562.528.400,00, Tahun 2021 Alokasi Dana Desa diturunkan sebesar 522.365.900,00, Tahun 2022 Alokasi Dana Desa diturunkan pemerintah sebesar 517.391.000,00. (Sumber: APBDes, Desa Bo'e).

Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bo'e

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bo'e bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk membangun sarana prasarana Desa. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Desa Bo'e.

“Tujuan Pengelolaan Dana Desa untuk membangun sarana prasarana desa yang belum ada dan memperbaiki yang sudah ada, dengan pengelolannya melibatkan masyarakat transparan dan akuntabel” (wawancara dengan Kepala Desa).

“Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan melibatkan masyarakat dan semua program nya sudah terimplementasi dengan baik” (wawancara dengan Bendahara Desa).

Hal ini diperkuat dengan visi dan misi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Desa Bo'e Tahun 2015 yaitu, Mampu Menggerakkan Masyarakat dalam Pembangunan Agar Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Desa. Menurut Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa mempunyai tujuan untuk pembangunan Desa agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bo'e

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Bo'e di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 29, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan di Desa Bo'e dilakukan dengan merencanakan program-program yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa. Proses pelibatannya mulai dari musyawarah tiap dusun kemudian di

bawa dalam Musyawarah Desa untuk di putuskan bersama-sama. Peran Perangkat Desa dalam hal ini sebagai pengawas proses perencanaan dan peran masyarakat sebagai pelaksana setiap program kerja (wawancara perangkat desa).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat desa dan di awasi oleh perangkat desa. Pelaksanaan ini dilakukan dengan swakelola, swakelola artinya Desa itu sendiri yang ambil ahli dalam mengelola setiap pelaksanaan kegiatan, Alokasi Dana Desa, Dana Desa (wawancara perangkat desa).

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan ini menjadi tugas dari kaur keuangan selaku fungsi kebidaharaan dan Kepala Desa yang melakukan penatausahaan ini baik dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Masyarakat tidak dilibatkan dalam penatausahaan ini (wawancara perangkat desa).

d. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dalam tahapan semester pertama dan laporan akhir tahun untuk melaporkan semua penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa. Mekanisme Pelaporan Dana Desa Bo'e mempunyai proses sebagai berikut, laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan pertama adalah realisasi APBDDesa dan Laporan akhir tahun adalah laporan penyampaian laporan-laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Masyarakat tidak terlibat dalam pelaporan pelaksanaan ADD dan DD, ini menjadi tugas dari kaur keuangan selaku bendahara desa (wawancara perangkat desa).

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban di buat dalam waktu tiga bulan, agar dapat dilihat apa saja yang menjadi belanja Desa di laporan pertanggungjawaban dan harus dilihat sudah sesuai dengan APBDes atau belum. Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program kepada pemerintah pusat apakah sudah sesuai dengan belanja desa atau belum dan masyarakat tidak dilibatkan dalam setiap proses pertanggungjawaban karena ini menjadi tanggung jawab perangkat desa kepada pemerintah pusat (wawancara perangkat desa).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa masyarakat desa hanya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sedangkan dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, masyarakat desa tidak dilibatkan karena itu hanya menjadi tugas dari perangkat-perangkat Desa yang sudah mempunyai wewenang masing-masing dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa.

Pengalokasian Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e dari tahun 2020,2021,2022 sudah ter alokasi sesuai dengan jumlah bantuan yang diturunkan oleh pemerintah dan semua dana yang diturunkan oleh pemerintah semuanya sudah cukup. Jadi tidak ada kendala dalam hal Keuangan untuk pembangunan Desa maupun dalam memenuhi gaji atau tunjangan pemerintah Desa karena Dana yang diturunkan oleh Pemerintah ke Desa itu sudah cukup dan sudah memenuhi APBDes. (wawancara Bendahara Desa).

Alur Mekanisme Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e dengan cara Dana di transfer langsung oleh Pemerintah ke rekening Desa dan dapat ditarik melalui surat rekomendasi dinas PMD, penarikan Dana dilakukan oleh kaur keuangan desa dengan menandatangani spesimen baru beserta tanda tangan Kepala Desa. Setelah Dana itu ditarik maka dana itu dikelola dengan pos anggaran nya masing-masing. (wawancara Kepala Desa Bo;e).

Penggunaan Dana Desa di Desa Bo'e sudah sesuai dengan kebutuhan Desa Bo'e sendiri. Penggunaan Dana Desa di Desa Bo'e dilakukan menggunakan skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan paling terpenting dalam suatu pekerjaan, mementingkan pembangunan dalam Desa baik dalam pembangunan Desa maupun Pelayanan terhadap masyarakat (wawancara

Kepala Desa Bo'e). Adapun susunan tim pelaksana dalam kegiatan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Kepala Desa: Kepala Desa berperan sebagai penanggung jawab dalam kegiatan (Kuasa Pengguna Anggaran).
2. Sekretaris Desa: Sekretaris Desa sebagai tim verifikator (yang mengontrol semua penggunaan anggaran).
3. Bendahara Desa: Bendahara Desa sebagai bendahara pengeluaran anggaran

Tabel 3. Program Kerja Desa (2020-2022)

Tahun	Program
2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan jembatan - Drainase - Penghamparan jalan tani - Pembukaan badan jalan Dusun Korompaka - Pembukaan jalan pariwisata - Pembuatan talut jalan tani
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penghamparan jalan tani - Drainase - Pembuatan plat deker di beberapa titik
2022	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Drainase Dusun 1 - Talut jalan tani - Pembuatan ternak babi BUMDes

Sumber Data: (wawancara Kepala Desa dan Bendahara Desa)

Kendala Dalam Implementasi Program Pembangunan Desa

Kendala merupakan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam mengimplementasikan program pembangunan Desa ada beberapa kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa seperti material pembangunan yang jauh dari tempat kegiatan pembangunan, faktor cuaca yang berubah-ubah, dan bahan pabrikaan cukup jauh dari desa. Tetapi untuk dana yang dikelola tidak ada kendala karena semua dana yang diberikan pemerintah itu sudah cukup dan memenuhi kebutuhan Desa.

“Kendala yang kami hadapi sebagai pelaksana kegiatan adalah material yang jauh dari tempat kegiatan, dan juga faktor cuaca yang berubah-ubah karena kadang hujan jadi pekerjaan terhambat, dan juga jarak bahan pabrikaan jauh dari desa bo'e” (wawancara Kepala Desa).

“Menurut saya untuk kendala dana tidak ada karena dana yang diberikan pemerintah sudah cukup untuk setiap kegiatan pembangunan Desa” (wawancara Bendahara Desa).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya menurut Suha (2018), mengatakan bahwa kendala yang dialami dalam pengelolaan DD maupun ADD adalah Keterlambatan Pelaporan, Perubahan APBDes, internet dan pemahaman masyarakat sangat berbeda dengan hasil wawancara perangkat desa Bo'e, karena dijamin sekarang internet sudah bagus jadi tidak ada kendala dalam pelaporan perubahan APBDes.

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam implementasi program pembangunan desa, untuk pelaksanaan kegiatannya ada beberapa kendala, sedangkan untuk dana tidak ada lagi kendala karena dana yang diberikan sudah sesuai dengan APBDes.

Presepsi Masyarakat Desa Bo'e Terhadap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e

Pengetahuan Masyarakat Tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e mempunyai pengertian dan tujuan yang berbeda. Pemahaman tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ini seharusnya dimiliki oleh masyarakat karna ini berkaitan dengan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga masyarakat secara singkat mengetahui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Menurut bapak AM, Dana Desa adalah Dana yang di transfer oleh Pemerintah Pusat yang pemberdayanya untuk masyarakat Desa sendiri sedangkan Alokasi Dana Desa hanya terfokus pada Kesejahteraan Perangkat Desa dan semua yang terlibat dalam pemerintahan Desa. Menurut bapak JM, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah pendukung program Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa karena tanpa adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Program tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Menurut bapak YN, Dana Desa adalah Dana yang di transfer untuk pembangunan Desa, dan Alokasi Dana Desa adalah Dana yang anggarannya dikelola untuk Pemerintah Desa.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa bo'e mengetahui tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa bo'e. Hal ini juga sangat mempengaruhi pelaksanaan ADD maupun DD karena masyarakat perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan ADD maupun DD dan tujuan pelaksanaan programnya mengarah pada pembangunan apa saja.

Keterlibatan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Bo'e

Menurut hasil penelitian masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dimana mulai dari proses perencanaan masyarakat di undang dalam rapat pembangunan desa yang disebut dengan Musyawarah Desa untuk merencanakan setiap program yang akan dilaksanakan untuk pembangunan Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunannya juga dilakukan oleh masyarakat Desa langsung.

Menurut wawancara bapak AM, Masyarakat ikut terlibat dalam setiap proses perencanaan yang dilakukan di Desa dalam setiap proses kegiatan pembangunan desa masyarakat di Desa Bo'e selalu dilibatkan. Hal yang dilakukan Pemerintah Desa sebelum melibatkan masyarakat Desa adalah dirembuk di tiap-tiap Dusun sampai ke Musyawarah Desa untuk penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan di biayai selama satu tahun anggaran. Dan semua Program yang di biayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah di sampaikan dalam Musyawarah Desa tersebut.

Menurut wawancara bapak JM, Keterlibatan Masyarakat Desa Bo'e dalam setiap proses perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Karna di tahun-tahun sebelumnya selalu dilakukan Musyawarah Desa tentang proses perencanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa seperti pembuatan jalan tani maupun akses-akses jalan lain dalam desa.

Menurut wawancara bapak YN, Keterlibatan masyarakat desa adalah di adakan MUSDUS (Musyawarah Dusun) kemudian ke MUSDES (Musyawarah Desa) jadi masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap proses-proses perencanaan dalam perencanaan program maupun pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Bo'e.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dari masyarakat desa mengatakan bahwa mereka dilibatkan dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan Desa. Hal ini sudah sejalan dengan apa yang telah dikatakan perangkat Desa dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa masyarakat Desa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bo'e

Persepsi masyarakat Desa Bo'e tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa di Desa Bo'e menurut masyarakat sudah sangat baik karena semua pelaksanaan

pengelolaannya dilakukan secara transparan kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa, sehingga masyarakat Desa juga bisa mengetahui apa saja program pembangunan desa. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bo'e.

“Persepsi saya tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa ini sudah sangat baik, mengapa? Karna pengelolaannya sudah tepat sasaran dan sudah transparan dengan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Yang perlu ditingkatkan lagi Kerjasama antar Lembaga.”(wawancara bapak AM).

“Persepsi saya tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sangat baik apalagi sekarang ini Desa Bo'e sudah dikatakan desa Maju. Sangat baik dari segi pengelolaannya dan pelaksanaannya yang melibatkan masyarakat Desa langsung hal ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk semua masyarakat desa yang bersedia ikut dalam setiap kegiatan pembangunan Desa” (wawancara bapak JM).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bo'e sudah sangat baik untuk masyarakat desa, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya.

Manfaat Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Manfaat Dana Desa dan juga Alokasi Dana Desa sangat dirasakan oleh masyarakat di Desa Bo'e, dengan adanya Dana Desa Pembangunan Desa sudah terlaksana sesuai perencanaannya untuk membangun Desa, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa dapat membantu setiap pelayanan pemerintah desa untuk masyarakat desa. Adapun tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat desa tentang manfaat pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e.

Menurut wawancara kepada masyarakat Desa, Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dirasakan oleh Masyarakat Desa contohnya penghamparan jalan tani bermanfaat untuk para petani agar lebih mudah dalam melakukan pekerjaan, penanganan gizi pada anak-anak bermanfaat untuk Kesehatan anak-anak, pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendapatan ekonomi masyarakat, pelayanan perangkat Desa kepada masyarakat sudah baik, dan bantuan untuk masyarakat miskin. Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Bo'e juga sudah dilihat dari sisi pembuktian pembangunan-pembangunan yang ada di Desa jadi masyarakat sudah merasakan setiap manfaat dari Pengelolaannya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ADD dan DD sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat baik dari segi pendapatan ekonomi masyarakat maupun pelayanan kepada masyarakat Desa dari pemerintah Desa. Adapun harapan-harapan dari Masyarakat Desa untuk pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e ke depannya.

“Harapan saya agar lebih transparan lagi dalam pengelolaan keuangan, penggunaan dana tepat pada sasaran, bisa membangkitkan ekonomi masyarakat desa” (wawancara bapak AM). “Harapan saya kedepannya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masih diperuntukkan untuk pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa dan pemerintah Desa”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 yang diturunkan oleh pemerintah untuk Desa Bo'e, dana tersebut telah digunakan sesuai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa. Program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bo'e, menurut hasil penelitian, telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan dari program Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa yang telah terlaksana dan sesuai dengan APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh desa dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Pertama, sosialisasi mengenai Alokasi Dana Desa dan Dana Desa harus sering dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat memahami mengenai pengelolaan dana tersebut. Kedua, kepada pemerintah desa, diharapkan agar meningkatkan kerja sama yang baik antara lembaga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Guampe, F. A., Sagajoka, E., Damanik, D., Suatmi, B. D., Kundhani, E. Y., Supartoyo, Y. H., Ladjin, N., Lempao, N. M., Nona, R. V., & Jaya, A. H. (2023). *Ekonomi Pembangunan (Strategi dan Kebijakan)*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(2), 107. <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i2.1007>
- Manatar, K., Manaroinsong, J., & Pontoh, J. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Mustanir, A., Kundhani, E. Y., Mursak, Guampe, F. A., Sari, R. M., Prasetyo, A., Boari, Y., Heryani, A., Nazipawati, Permatasari, C., Amane, A. P. O., Fitrianto, M. R., & Asasandi, I. G. N. A. (2023). *Perencanaan Pembangunan (Memahami Konsep Dan Prakteknya)*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Nuryadi, I., & Istiqomah, K. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sumber Agung. *Jurnal Manajemen Dan ...*, 1(2).
- Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian kuatintatif , kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>
- Wulan, D. D. N., & Helmy, H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(1). <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.651>
- Yosefa Dhiu, M., Tameno, N., & Hewe Tiwu, M. I. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1056>